

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN INFORMASI BERBASIS *E-
GOVERNMENT* DI DINAS KOMINFO KABUPATEN BONE**



Oleh:

RAHMAT HIDAYAT

Nomor Induk Mahasiswa : 105611104319

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN INFORMASI BERBASIS *E-
GOVERNMENT* DI DINAS KOMINFO KABUPATEN BONE**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Administasi Publik (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

RAHMAT HIDAYAT

Nomor Induk Mahasiswa : 1056 11104 319

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Informasi Bebalas E-
Goventment di Dinas Kominfo Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Rahmat Hidayat

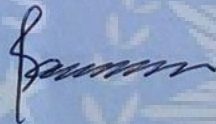
Nomor Induk Mahasiswa : 105611104319

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

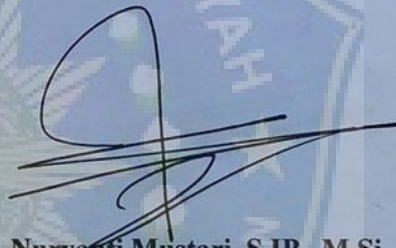
Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Lukman Hakim, M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

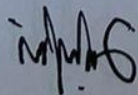
Mengetahui:

Dekan

ketua Program Studi

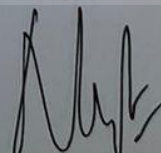
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM : 730727



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM : 99174

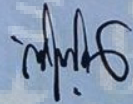
HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0147/FSP/A.4-II/V44/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis 08 juni 2023.

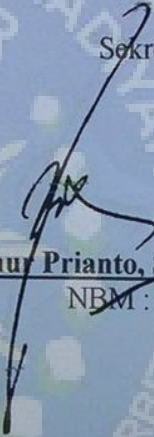
Mengetahui :

Ketua

Sekretaris

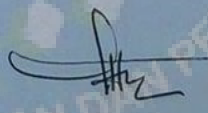
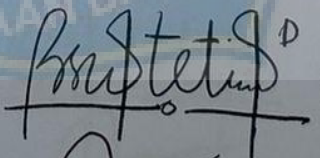
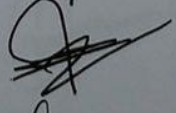



Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si
NBM : 730727



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

Tim Penguji

1. Dr.Jaelan Usman, M.Si ()
2. Dr.Hj Budi Setiawati, M,Si ()
3. Dr. Nuryanti Mustari S.IP., M.Si ()
4. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmat Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 105611104319

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar penelitian ini adalah karya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumberlain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Januari 2023

Yang Menyatakan,

Rahmad Hidayat

**RAMHAT HIDAYAT, LUKMAN HAKIM, NURYANTI MUSTARI.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN INFORMASI BERBASIS *E-
GOVERNMENT* DI DINAS KOMINFO KABUPATEN BONE**

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Penerapan *E-Goveerment* dalam Pengelolaan Informasi di Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian yaitu, Pertama mengetahui kegunaan *E-Government* bagi masyarakat, Pemanfaatan website di Pemerintah Kabupaten Bone adalah untuk menciptakan pengelola website yang mampu menyediakan dan menyampaikan informasi untuk kepentingan Pemerintah daerah serta meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui internet. Website Pemerintah Kabupaten Bone adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten Bone di Internet untuk memberikan informasi tentang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.

Kedua, Hasil penelitian yang di temukan penulis kemudahan informasi berbasis *e-government* untuk masyarakat dapat di nikmati degan Diskominfo menyediakan website, jaringan internet dan hospot serta 33 inovasi layanan yang di oprasikan masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Bone yang dapat di akses langsung masyarakat.. Ketiga, kemudahan masyarakat dapat di nikmati degan Diskominfo menyediakan *website*, jaringan internet dan hospot serta 33 inovasi layanan yang di oprasikan masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Bone yang dapat di akses langsung masyarakat.

Ke-empat, penyajian informasi *e-government* dari efektivitas penerapan *e-government* pengelolaan informasi di Kabupaten Bone bahwa efektifitas kecepatan penyediaan informasi di Kabupaten Bone dapat cepat di publikasikan dengan update *website* resmi sehingga informasi layanan dapat di akses 24 jam walaupun kontor pemerintah telah tutup dan sosialisasi spot *free wifi* yang telah di laksanakan.

Kata Kunci; Efektivitas, E-Government, Pelayanan Publik

ABSTRACT

The purpose of this research was to find out how effective the application of e-government is in information management in Bone district. This type of research is qualitative. The results of the study are, First, to find out the use of E-Government for the community. The use of websites in the Bone Regency Government is to create website managers who are able to provide and convey information for the benefit of the local government and improve information services to the public via the internet. The Bone Regency Government Website is the official website of the Bone Regency Government on the Internet to provide information about governance, development and society to the public.

Second, the results of the research found by the author that e-government-based information facilities for the community can be enjoyed by Diskominfo providing websites, internet networks and hotspots as well as 33 service innovations operated by each local government agency in Bone Regency which can be accessed directly by the community. Third, the convenience of the community can be enjoyed by Diskominfo providing websites, internet networks and hospots as well as 33 service innovations operated by each local government agency in Bone Regency which can be accessed directly by the community.

Fourth, the presentation of e-government information from the effectiveness of implementing e-government information management in Bone Regency that the effectiveness of the speed of providing information in Bone Regency can be published quickly with official website updates so that service information can be accessed 24 hours even though the government offices are closed and free wifi spot socialization that has been implemented.

Keywords; Effectiveness, E-Government, Public Service

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **‘Efektivitas Pengelolaan Informasi Berbasis E-Government di Dinas Kominfo Kabupaten Bone’** ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Shalawat serta salam tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tidak hanya seorang Nabi dan Rosul yang telah mengepakan suatu peradaban tetapi juga merupakan sosok pejuang yang mampu menerangi semua sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini, semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan fana ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu bejalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa lembaran ini adalah awal pencarian

dan proses pemikiran penulis yang sebenarnya karena isi hati dan pikiran kita adalah hal yang terindah di dunia ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda **KAMARUDDIN** dan ibunda **RABAU** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat

Pada kesempatan ini pula penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr.Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, M.Si selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Nuyanti Mustari,S.IP.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan

masukannya serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing, dan menyempurnakan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan pemikiran penulis
6. Seluruh Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Bone Dan Masyarakat Bone yang cukup Responsif dalam membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Teman-Teman PIKOM IMM FISIP UNISMUH MAKASSAR yang selama ini telah memberikan Ilmu dan berbagai pengalaman tentang berorganisasi.
8. Teman-teman mahasiswa seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus kelas D angkatan 2019 atas segala bantuan dan kebersamaannya selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terimakasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semoga Allah SWT yang maha pemurah melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi semua oihak yang telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan Skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 10 Juli 2023



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Konsep dan Pengertian Efektivitas	12
C. Konsep dan Pengertian <i>E-Government</i>	15
D. Kerangka Pikir	22
E. Fokus Penelitian	24
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian.....	27
C. Informan Penelitian.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Pengabsahan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	33
B. Gambaran Khusus Objek Penelitian	39
C. Hasil Penelitian	45
D. Pembahasan Penelitian.....	53
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Informasi adalah suatu sistem yang terdiri atas berbagai jenis komponen-komponen yang tersusun dalam suatu organisasi demi mewujudkan tercapainya tujuan yaitu mendapatkan sebuah informasi. Sistem informasi memberikan manfaat mulai dari penginputan data, memanipulasi data, blok informasi, dokumentasi manajemen, menjalankan pelayanan, penyimpanan dan mengakses data.

Komponen-komponen sistem informasi penting untuk digunakan termasuk organisasi atau perusahaan, baik itu kalangan swasta maupun pemerintah (Fachrial et al., n.d.). Keunggulan dari sistem informasi ini adalah kecepatan dan ketepatan pengolahan data dengan kapasitas yang cukup besar, serta kemudahan dan kecepatan dalam mengambil informasi dari data base yang cukup besar. Karena kelebihan, kenyamanan dan kecepatan proses informasi, sistem informasi ini sangat berguna bagi semua otoritas, baik swasta maupun lembaga negara (Dwijosusilo & Sarni, 2018)

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berkembang sangat pesat untuk semakin memudahkan aktivitas manusia. Tidak terkecuali kegiatan Pemerintahan, baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan itu sendiri maupun dalam melayani masyarakat. *e-government* sebagai bentuk modernisasi proses penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan secara menyeluruh juga merupakan perubahan bentuk pelayanan publik

kepada masyarakat, tidak hanya di pusat tetapi juga di tingkat daerah (Hasibuan & Sulaiman, 2019)

E-Government merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan akses informasi publik kepada masyarakat.

Pelaksanaan *E-Government* dan peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien memerlukan kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* (Wirawan, 2020). Kebijakan dan strategi tersebut diatur dalam Inpres No.3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* di jajaran Pemerintah. Menurut (Bimrew Sendekie Belay, 2021) pada seminar nasional informatika yang berjudul peran *e-government* dalam rangka mewujudkan *e-government* bagi masyarakat, menyimpulkan bahwa sosialisasi *e-government* perlu dilakukan secara konsisten kepada masyarakat agar dapat mengetahui manfaat yang diperoleh dengan penerapan *e-government*.

Perkembangan saat ini berfokus pada perkembangan teknologi informasi, Hage and Powers dalam Anwar (2003:111) dalam (Cyndika, 2018) menyebutkan penggunaan teknologi informasi sebagai ciri yang menonjol pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini. Perkembangan teknologi informasi semakin meluas ke segala bidang kehidupan. Teknologi informasi telah menyebabkan banyak perubahan dalam pemikiran masyarakat dan juga dalam persepsi mereka tentang produksi dan manajemen pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan model pengambilan keputusan yang berbeda yang terdiri oleh teknologi informasi berupa

penyajian data berbasis web yang telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan informasi semua lapisan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi modern dalam bentuknya saat ini telah menimbulkan pengaruh yang besar untuk Pemerintah sebagai penyedia layanan dapat lebih terbuka, efisien dan efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahannya serta dapat memberikan kemudahan akses terhadap informasi, khususnya terhadap informasi yang akan disediakan oleh Pemerintah, hal ini mendorong Pemerintah untuk menerapkan konsep *e-government*, yang sering disebut *e-goverment* (Khariroh, 2021).

Pada kenyatan, tahapan pengembangan dalam praktik pengembangan *e-government* organisasi Pemerintah Daerah di Indonesia masih berbeda-beda. Beberapa daerah masih tertinggal dalam penggunaan teknologi informasi, bahkan ada yang tidak memiliki website (Wirale stari & Fredy O, 2018), Indonesia telah mengatur penggunaan website diatur untuk komunikasi dan pencarian informasi. Dalam hal ini penggunaan website diatur oleh peraturan Perpres No.3 Tahun 2003 tentang strategi dan kebijakan pengembangan *e-government*.

Hadirnya Perpres No.3 Tahun 2003 dalam (Mubarak, M., 2017) sehingga; (1) Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kemungkinan penggunaannya yang meluas membuka peluang bagi penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat; (2) Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan (Administrasi elektronik)

meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara. (3) Pelaksanaan *e-government* dan peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif memerlukan kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* mengingat setiap daerah/kota di Indonesia telah memiliki website, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Proses untuk mengimplementasikan pengembangan *e-government* untuk mencapai pemahaman bersama, tindakan serentak dan langkah terintegrasi di semua departemen Pemerintahan.

Perpres No. 3 Tahun 2003. Tersebut kemudian ditindak lanjut dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 65 Tahun 2005 tentang pengembangan layanan *e-government* di berbagai instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah. Serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28/perkominfo/9/2006 tentang penggunaan domain go.id dalam situs resmi Pemerintah pusat dan daerah.

Kabupaten Bone merupakan daerah yang telah melakukan penerapan kebijakan instruksi Presiden dengan hadirnya website di Kominfo. oke.go.id. Website tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi tentang Kabupaten Bone. Serta Peraturan Pemerintah Negara Nomor 383 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Edisi 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038) menerangkan pemanfaatan website di Pemerintah Kabupaten Bone adalah untuk menciptakan pengelola website yang mampu menyediakan dan menyampaikan informasi untuk kepentingan

Pemerintah daerah serta meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui internet. Website Pemerintah Kabupaten Bone adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten Bone yang memberikan informasi tentang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam pelayanan publik. Tahap ini akan menentukan apakah kebijakan Pemerintah di bidang ini benar-benar dapat diterapkan dan apakah telah berhasil memberikan hasil dan hasil seperti yang direncanakan. Untuk mewujudkan capaian dan hasil yang dicapai, maka kebijakan publik harus diimplementasikan, karena jika tidak, maka kebijakan tersebut hanya menjadi catatan elit, seperti yang diutarakan Udoji, karena implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada berpolitik. Politik hanya mimpi atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Wahab, 2021).

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Sebagaimana dikemukakan oleh Hasbullah (2015) dalam (Iqbal et al., 2023) Proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahapan pengambilan keputusan politik, dimana aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pengambilan keputusan dan di visualisasikan sebagai rangkaian yang saling berhubungan, tahapan disusun secara sistematis, seperti penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi Resta Patarai (Patarai, 2020) dengan judul Peran dalam bagian pengolahan data elektronik dalam penyelenggaraan *e-goverment* bahwa penggunaan website resmi telah mencapai tahapan interaksi melalui forum chat dan email, sudah mempunyai fungsi dan orientasi guna pencapaian visi dan misi Kota Semarang dan bagian-bagian terkait dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik.

Perkembangan teknologi informasi diterapkan dalam bentuk penyelenggaraan Pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk manajemen tersebut adalah penggunaan sistem manajemen berbasis teknologi yang biasa disebut dengan *E-manajemen*.

E-Government merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pengolahan data yang cepat dan informasi yang akurat. *e-goverment* diperlukan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan Pemerintah khususnya birokrasi.

Berdasarkan data website/koneksi internet yang disediakan oleh *Hootsuite*, terdapat 204,7 juta orang/2021 di seluruh dunia khususnya di

Indonesia. Tentunya hal ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dalam hal jumlah pengguna website/jaringan khususnya wilayah Bone. Berdasarkan BPS Kabupaten Bone jumlah penduduk Kabupaten Bone tahun 2022 yaitu (801 775) jiwa yang terdiri dari 391682 penduduk laki-laki dan (410093) penduduk perempuan pada 27 Kecamatan 328 desa dan 44 kelurahan. Jumlah pegawai negeri sipil 8.123 jiwa terdapat dari 58 satuan kerja perangkat daerah. Melihat jumlah pegawai negeri sipil yang terdaftar menurut siska BKPSDM Kabupaten Bone bahwa akses web di ruang lingkup Pemerintah belum maksimal.

Melalui website yang terintegrasi akan sangat dimungkinkan bagi warga Kabupaten Bone atau komunitas pebisnis, komunitas pemuda dan mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah transaksi dengan instansi Pemerintah tanpa harus mengunjungi beberapa kantor daerah maupun dinas-dinas terkait. Selain itu memungkinkan organisasi sektor publik untuk berinteraksi langsung dan bekerja lebih baik dengan bisnis. Terlepas dari lokasi. Ini termasuk digitalisasi pelayanan pengadaan ke bisnis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kenyamanan dan efektifitas biaya mereka.

Berdasarkan Observasi awal penulis dilapangan, terdapat Masalah yang sering muncul yaitu keakuratan data dan update informasi-informasi baru. Informasi yang ditampilkan dalam website daerah Kabupaten Bone harus selalu terupdate dengan informasi-informasi terkini sehingga website tersebut menjadi pilihan sumber pencarian informasi untuk masyarakat Kabupaten Bone. Masalah lainya terdapat pada sumber dana, sumber daya manusia seperti

tenaga ahli di Pemerintah Kabupaten Bone yang saat ini masih kurang, terutama tenaga ahli yang memiliki kemampuan di bidang sistem informasi dan komputer.

Dari permasalahan diatas maka penelitian bertujuan untuk mengetahui, mendalami dan menganalisis proses penerapan *e-government* dalam pengelolaan informasi di Kabupaten Bone. Kontribusi penelitian ini untuk menjadi rekomendasi dan saran sekaligus untuk meningkatkan *e-government* dalam pengelolaan informasi di Pemerintahan Kabupaten Bone.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana memudahkan dalam pembuatan karya ini, penulis merumuskan masalah dalam beberapa rangkaian pertanyaan, diantaranya adalah

Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Informasi Berbasis *E-Government* di Dinas Kominfo Kabupaten Bone ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Informasi Berbasis *E-Government* di Dinas Kominfo Kabupaten Bone

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menjadi bahan pembelajaran komparatif untuk penelitian selanjutnya dan menjadi sumbangan

pemikiran untuk menyelesaikan studi ilmiah yang mengarah pada pembangunan khususnya terkait dengan *E-Government*

2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan dalam praktik bagi Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kinerja pegawai Kantoran khususnya di dinas Kominfo.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait pada bagian ini “Efektivitas Penerapan *E-Government* dalam Pengelolaan Informasi di Kabupaten Bone “Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini ialah.

Penelitian ini berfokus dalam observasi merupakan suatu aktifitas yang dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan dilakukan oleh peneliti secara berkesinambungan sehingga memperoleh fakta sesungguhnya di lapangan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan ketika diperlukan pengecekan langsung terhadap kualitas pelayanan aparatur Pemerintahan melalui penerapan *E-Government* di Kantor Kementrian komunikasi dan informasi Kabupaten Bone

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA	HASIL
1.	Sry Handayani” Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Melalui Penerapan E-government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone” (Handayani, 2020)	Tentang sistem informasi secara umum, unsur-unsur itu mencakup orang teknologi,proses dan. organisasi. Kemudian memenuhi konsep sistem informasi yang baik semua unsur-unsur tersebut harus memiliki standar yang harus di ikuti dan ditegakkan.

2.	Andi Wahyu Utama Arif Diyatri Muhibbudin” Efektivitas Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Melalui Sappa Bone Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (Muhibbudin, 2022)	Mencapai, dimensi ini masih memiliki masalah memperbaiki, bilah kemajuan Sappa Bone yang isarana dan prasarana. Dimensi Integrasi, masih terdapat permasalahan pada dimensi ini mana menemukan indikator antara komunikasi dan pembangunan Wilayah pelayanan Sappa Bone dibatasi oleh sumber daya manusia masih minim, serta sebagai indicator.
3.	Ian Alfian Ishaq” Penerapan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Sebagai Layanan Pengaduan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (Ishaq, 2022)	Pencapaian merupakan hasil dari suatu tujuan yang menyangkut upaya pencapaian yang dilihat sebagai suatu proses, hasil analisis bahwa aplikasi Sappa Bone sudah berjalan dengan baik dan juga salah satu aplikasi pengaduan masyarakat yang membantu dalam memberikan informasi serta pengaduan pelanggaran peraturan Pemerintahan daerah. Hal ini merupakan salah satu pencapaian yang harus dilihat sebagai bentuk suatu proses dalam memudahkan dan meningkatkan kinerja.

Pertama Sry Handayani dalam penelitiannya memiliki kesamaan dengan penelitian dengan penulis yang terdapat pada penerapan *e-government* di kabupaten Bone. Persamaan lainya juga terlihat di metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Terdapat perbedaan penelitian Andi Wahyu Utama

Arif Diyatri Muhibbudin dengan penelitian penulis diketahui indikator teori yang di gunakan, lokasi penelitian, dan jenis program *e-goverment* yang berbeda dengan penelitian ini. (Handayani, 2020).

Persamaan penelitian dari Andi Wahyu Utama Arif Diyatri Muhibbudin terdapat pada objek penelitian yang sama, berfokus kepada untuk mengetahui efektifitas kinerja penerapan inovasi pelayanan berbasis digital (*e-goverment*) dan metode yang di gunakan yaitu kualitatif deskriptif. Terdapat perbedaan penelitian Andi Wahyu Utama Arif Diyatri Muhibbudin dengan penelitian penulis diketahui indikator teori yang di gunakan, lokasi penelitian, dan jenis program *e-goverment* yang berbeda dengan penelitian ini. (Muhibbudin, 2022).

Selanjutnya persamaan penelitian dari Ian Alfian Ishaq terdapat pada fokus penelitian yang sama, berfokus kepada penerapan inovasi pelayanan berbasis digital (*e-goverment*) yaitu apakah LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN yang termasuk ke dalam pelayanan berbasis digital (*e-goverment*) berjalan baik ataupun tidak. Metode yang di gunakan yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian A Alfian Ishaq dengan penelitian penulis diketahui indikator, lokasi penelitian, dan jenis program *e-goverment* yang berbeda dengan penelitian ini. (Ishaq, 2022).

B. Konsep dan Pengertian Efektivitas

a) Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat

membawa hasil. Jadi, Efektivitas adalah keaktifan, dayaguna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam sebuah organisasi kegiatan ataupun sebuah program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai. Pengertian efektifitas adalah suatu pemanfaatan sarana perasarana sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah di tetapkan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Putri, 2019).

Penelitian (Sugirna, 2022) menjelaskan pengertian tersebut Efisiensi dan efektivitas, “Kinerja berdasarkan desain sebagai tingkat seberapa jauh jangkauan sistem sosial melukis Efisiensi ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi berarti perbandingan biaya dan hasil, sementara efisiensi berhubungan langsung dengannya dengan pencapaian tujuan”. Sementara itu, dalam penelitian Mahsun (Mahsun, M., & Koiriyah, 2017). Efisiensi (produktivitas) adalah hubungan antara kinerja dan tujuan atau sasaran untuk mencapai Ada definisi efisiensi secara signifikan terkait dengan pencapaian tujuan atau tujuan politik. Kinerja menunjukkan keberhasilan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Ketika hasil kegiatan mendekati tujuan, itu artinya semakin besar efisiensinya.

b) Hakikat Efektivitas

Efektivitas adalah mencapai tujuan secara tepat atau memilih tujuan hak untuk memilih beberapa jalan dan membuat pilihan di antaranya pilihan lain. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Abdurahmat (2003: 92) dalam (Allena, J.M., et al., 2003) “Efisiensi adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sejumlah tertentu sengaja ditetapkan terlebih dahulu agar Anda menang jumlah waktu kerja. Sementara Sondang P. Siagian (2001:24) dalam (Fahreza et al., 2019) mengandung definisi sebagai berikut: “Efisiensi adalah Penggunaan sumber daya, tempat dan infrastruktur sampai batas tertentu sengaja di takdirkan untuk menghasilkan beberapa produk unggulan fungsi layanan yang dilakukannya. Kinerja menunjukkan keberhasilan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Berdasarkan beberapa dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan sebelumnya Menentukan tujuan.

c) Manfaat Efektivitas

Efektivitas kerja bermanfaat dalam memberikan pelayanan kepada orang lain atau kepada organisasi yang menggunakan produknya, seperti halnya dengan organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun program organisasi yang bersangkutan. Tentunya melalui efektivitas memberikan banyak hal yang dapat menunjang akreditasi serta *value* dari sebuah organisasi, dan akan menambah peluang kerjasama serta relasi yang akan membangun serta memajukan organisasi tersebut.

C. Konsep dan Pengertian *E-Government*

a) Pengertian *E-Government*

Dalam prakteknya, *E-Government* berkembang cukup baik, karena dampak pengenalan *E-Government* telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam proses pelayanan publik. Administrasi elektronik kemudian dipahami sebagai model pelayanan publik dalam bentuk baru dan dianggap cocok untuk menerapkan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Paradigma Pelayanan Publik Baru.

Pengertian *E-Government* Mustopadijaya (2003) dalam (Habibullah, 2010) mengusulkan bahwa *E-Government* (e-adm) menggantikan istilah *E-Government* yang diberikan kepada Pemerintah yang menerapkan teknologi internet, intranet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program-programnya dan jasa.

Dalam bukunya membangun aplikasi *E-Government*, Indrajit (2002:3) dalam (Alfrait,2021) menyebutkan berbagai definisi Pemerintahan elektronik (*E-Government*) yang dikemukakan baik oleh lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah. Kelompok Bank Dunia mendefinisikan Pemerintahan elektronik (*E-Government*) dalam konteks penggunaan teknologi informasi (misalnya teknologi informasi). Organisasi administrasi publik mampu membangun hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi Pemerintah lainnya. Tanpa mengesalkan pentingnya berbagai definisi yang dikemukakan di atas, setidaknya ada tiga karakteristik yang umum untuk setiap definisi (*E-Government*), yaitu:

Pertama, merupakan mekanisme interaksi baru (modern) antara Pemerintah dengan masyarakat dan kelompok kepentingan (stakeholder) lainnya. Kedua, tentang pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet. Tujuan ketiga yang dicapai adalah meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan kepada masyarakat.

b) Konsep *E-Government*

Menurut Indrajit (2002) dalam (Aprianty, 2016) konsep *E-Government* Pemerintah berkembang karena tiga faktor utama, yaitu:

- a) Era globalisasi datang lebih cepat dari yang kita kira. Isu-isu seperti demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, Korupsi, masyarakat sipil, Pemerintahan yang baik, perdagangan bebas pasar Terbuka dan sebagainya adalah hal utama yang harus diperhatikan bangsa manapun, jika yang bersangkutan tidak mau keluar federasi dunia. Dalam format ini, Pemerintah harus menyesuaikan kembali posisinya tentang peran mereka di dalam negeri, secara internal dan eksternal. Fokus pada kebutuhan dalam Negeri, lebih baik fokus eksternal dan fokus pada status masyarakat dan Negara dalam asosiasi dunia.
- b) Adanya kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi). secepat informasi, informasi dan informasi dapat dibuat dengan sangat-sangat cepat dan dapat langsung digunakan dalam hitungan detik di semua lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia.
- c) Meningkatkan kualitas hidup manusia di dunia tidak dapat dipisahkan. Meningkatkan kinerja sektor swasta dalam melaksanakan kegiatan

secara ekonomis Jarak ke komunitas (seperti pelanggan).Pelaku ekonomi (pedagang,investor,perusahaan dan lain-lain).Untuk membuat pembentukan standar layanan yang meningkatkan sekarang dan lagi. Ketiga aspek di atas menimbulkan tekanan.Masyarakat yang menginginkan pemerintah meningkatkan kinerjanya secara signifikan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi yang ada dapat digunakan. Intinya *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat Meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak lain. Setidaknya ada empat klarifikasi format gambar baru digunakan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indrajit, 2002) dalam (Aprianty, 2016):

1. Pemerintah untuk Warga Negara (G2C)

Jenis aplikasi *E-Government* G2C ini adalah aplikasi yang paling umum biasanya di mana Pemerintah membangun dan memelihara berbagai portofolio Teknologi informasi dalam interaksi dengan masyarakat.

2. Dari Pemerintah ke perusahaan (G2B)

Tipe G2B (*Government to Business*) merupakan bentuk penyediaan layanan Informasi untuk perusahaan. Komunitas bisnis adalah jenis perusahaan swasta membutuhkan informasi dan data dari Pemerintah. Juga interaksi 19 Lingkaran bisnis dengan lembaga Pemerintah juga terkait dengan hak dan kewajiban untuk menjalankan bisnis sebagai perusahaan.

3. Pemerintah ke Pemerintah (G2G)

Aplikasi *Government-to-government* (G2G) juga diperlukan berinteraksi antara satu Pemerintahan dengan Pemerintahan lainnya Memfasilitasi kerjasama baik antar negara maupun antar identitas menangani masalah administrasi bisnis, proses politik, mekanisme hubungan sosial budaya dan lain-lain dll.

4. Dari Pemerintah ke Pegawai (G2E)

Jenis aplikasi *Government to Employees* (G2E) ditujukan untuk penggunaan internal untuk pegawai Pemerintah

a. Manfaat *E-government*

Beberapa keuntungan *E-Government* adalah (1) biaya administrasi yang lebih rendah; (2) meningkatkan kemampuan merespon berbagai Permintaan dan pelayanan publik, baik dari segi kecepatan maupun ketepatan; (3) dapat memberikan akses layanan untuk semua departemen atau LPND di semua tingkatan; (4) mendukung perekonomian lokal dan nasional; (5) sebagai cara menyalurkan umpan balik secara bebas dan tanpa rasa takut. Pada akhirnya, berbagai manfaat tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan secara umum (Satriya E 2006).

b. Tujuan *E-Government*

pengembangan *E-Government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan yaitu diantaranya :

- 1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas

serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

- 2) Pembentukan ini meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan Internasional.
- 3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- 4) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga Pemerintah dan Pemerintah daerah otonom.

c. Penerapan *E-Government*

Upaya besar telah dilakukan untuk memperkenalkan administrasi elektronik di Pemerintahan Di banyak tempat. Berasal dari upaya sebelumnya (ditemukan di Perangkat lunak sastra), ide, pemikiran, atau telah di pilih bagian berikut yang dapat digunakan untuk mengembangkan *E-Government* di Indonesia.

Pengembangan *E-Government* harus memiliki visi/tujuan dan strategi jelas dan terkait dengan pembangunan daerah Tidak semua bagian dari masyarakat kita dapat menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, tetapi tantangan global (seperti: pasar orientasi saya V saya sendiri Transfer horisontal vertikal pergeseran perpindahan vektor (Contoh: Singapura)

integrasi jaringan Internet internal Eksternal online Bisnis perkembangan Pelayanan publik penyedia layanan ASEAN Bebas 2003) dan dengan itu kebutuhan untuk menarik investor dan wisatawan Pemkot harus menyediakan dana yang cukup untuk pembangunan administrasi elektronik di daerah mereka sendiri. Perkembangan ini harus diperbaiki dengan visi, misi, strategi dan program pembangunan daerah atau dengan kata lain Di sisi lain, pengembangan *E-Government* harus memiliki tujuan dan agenda yang jelas. Sebagai contoh: Visi *E-Government* Singapura: “Menjadi pionir di bidang *E-Government* lebih baik melayani orang dalam ekonomi digital”, yang program strategisnya meliputi: “(1) tempat kerja berbasis pengetahuan, (2) pengiriman layanan elektronik, (3) teknologi Eksperimen, (4) meningkatkan efisiensi operasional, (5) adaptif dan kuat infrastruktur info komunikasi dan (6) pelatihan infokom” (Swee & Virginia, 2002) dalam (Matsumoro et al., 2003) Tanpa teknologi *E-Government* Pemerintah daerah kita akan melakukannya terisolasi dan tertinggal di dunia yang terbagi secara digital. Nanti Ditambah lagi dengan revolusi informasi yang didukung oleh perkembangan TIK yang pesat terjadi di luar sektor publik, yaitu antara lain: *E-banking*, *e-commerce*, pembelajaran jarak jauh dll.

E-Government yang lebih baik Sehingga kita berhasil dan sukses dalam implementasi *E-Government* kita harus melihat saran dari Harvard Policy Group (2000) dalam (Anwar, 2020) Dari Berdasarkan nasehat ini, kita harus melakukan delapan hal, yaitu: 1) Fokus pada bagaimana teknologi informasi dapat mendorong bentuk bisnis dan strategi di sektor publik. 2) Gunakan TI

untuk inovasi strategis, bukan hanya otomatisasi pendekatan taktis. 3) Gunakan praktik terbaik. Implementasi inisiatif penggunaan teknologi informasi. Contoh praktik terbaik diantara yang lain: Di Australia , Singapura sebuah perusahaan swasta Amerika dan 4) Meningkatkan anggaran dan pendanaan untuk inisiatif adopsi teknologi informasi yang menjanjikan (harapan untuk sukses). 5) Melindungi privasi dan keamanan. 6) pembentukan dan pengembangan kerjasama terkait teknologi informasi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. 7) Penggunaan teknologi informasi untuk mempromosikan kesempatan yang sama pekerjaan dan kepedulian sosial. 8) Mempersiapkan pengembangan demokrasi digital (democracy in era digital). Tindakan 1-4 mendukung transisi ke layanan elektronik selama 5-8 berurusan dengan tantangan baru Administrasi. Selain tips di atas dari Accenture (2001:8-9) dalam (Djunaedi, A., 2002) ada lima di antaranya keterampilan *E-manajemen* yang unggul, yaitu:

- a) Visi dan implementasi: Anda memiliki visi dan mekanisme sejak awal pelaksanaan yang baik/benar.
- b) Ditujukan untuk pengguna/warga: biasanya di awal Pengembangan *E-Government*, informasi yang dipublikasikan disusun dan di selenggarakan dengan mempertimbangkan pendekatan Pemerintah dan memberikan pelayanan fisik.

Administrasi elektronik yang unggul, layanan untuk publik atau warga negara dirancang dengan hati-hati kehendak dan pola pikir masyarakat umum, bukan cara kerjanya Otoritas Pemerintah. Untuk berkomunikasi

dengan Pemerintah Anda tidak perlu mengetahui struktur organisasi dan pengelolaan *E-Government* Pemerintah. Contoh Di Aplikasi IMB, klik tombol aplikasi juga ke layanan aplikasi lainnya (tidak perlu tahu instansi mana proses dan kemudian klik tombol Office).

- c) Penggunaan manajemen (Hubungan Pelanggan Manajemen/CRM). Humas Pemerintah telah mengubah misinya Pekerjaan humas di perusahaan jasa menggunakan teknik manajemen Informasi Pengguna Jasa, Pemasaran, Meminimalkan Pengumpulan Ganda Membuat profil perilaku pengguna Layanan dalam kerangka kerja memprediksi kebutuhan masa depan.
- d) Volume dan kompleksitas dapat menangani data dalam jumlah besar, kompleks (tapi tetap cantik dan terlihat polos atau sederhana untuk pengguna).
- e) Penggunaan portal ini sebagai dalam titik masuk untuk mudah Pengguna/warga negara yang tidak perlu mengunjungi setiap situs Badan, hanya satu sisi sebagai pintu masuk (portal), semua layanan yang diperlukan. Contoh: Layanan Portal eCitizen dari Pemerintah Singapura kepada Warganya.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan dilakukan untuk menganalisis bagaimana Efektivitas Penerapan *E-Government* dalam Pengelolaan Informasi di Kabupaten Bone, oleh karena itu untuk melihat efektivitas Penerapan *E-*

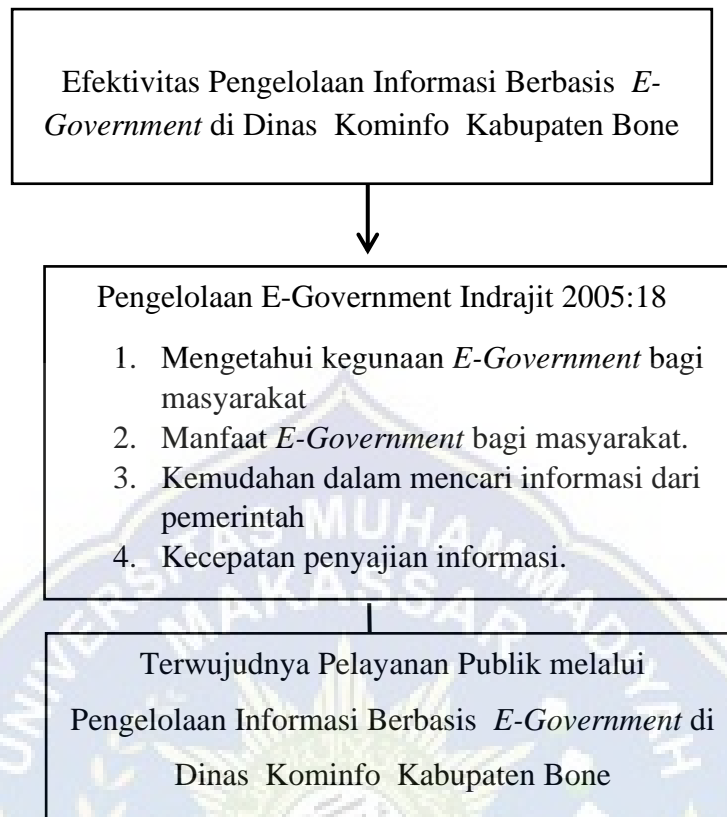
Government dalam pengelolaan informasi dapat dilihat dari 2 indikator yaitu kesatuan tindakan dan komunikasi.

Menjelaskan tentang definisi pelayanan *E-Government* yaitu segala bentuk pemenuhan kebutuhan dasar terkait hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga Negara dan penduduk atau suatu barang, jasa dan atau pelayanan Administrasi yang telah diselenggarakan oleh penyelenggara kebutuhan publik.

Pencapaian merupakan dalam hasil dari suatu tujuan yang menyangkut upaya pencapaian yang dilihat sebagai suatu proses, hasil analisis bahwa E-Government, sudah berjalan dengan baik dan juga salah satu aplikasi pengaduan masyarakat yang membantu dalam memberikan suatu informasi serta pengaduan pelanggaran peraturan pemerintahan Daerah.

Menggunakan fakta-fakta yang didapat oleh melalui observasi dilapangan yang diperkuat dengan informasi yang diperoleh peneliti dari proses wawancara dengan informan yang telah ditetapkan. Peneliti memadukan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti menyusun bagan kerangka pikir penelitian, sebagaimana yang terlihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah dalam pengelolaan *E-Government* dalam pengelolaan informasi yang sesuai dengan 3 indikator yaitu komunikasi, pembagian, kinerja dan disiplin.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Mengetahui kegunaan *E-Government* bagi masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan juga pekerjaan Administrasi dalam manajemen elektronik, dukungan personel dan infrastruktur yang baik serta strategi pemasaran. Strategi pemasaran *E-Government* tidak hanya didasarkan pada tampilan online yang menarik, tetapi juga membutuhkan

forum diskusi online, penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat pedesaan yang belum terlalu paham tentang internet dan *E-Government*. Dengan cara ini, orang terbiasa menggunakan teknologi informasi yang biasa.

2. Menguntungkan manfaat *E-Government* bagi masyarakat

Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari organisasi, baik organisasi komersial (profit) maupun sosial (nirlaba), tanpa memikirkan berapa nilai investasi yang harus ditanamkan. Investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi merupakan masalah yang kompleks bagi para pemimpin organisasi. disisi lain, mereka mengetahui dan berpikir bahwa sudah saatnya organisasinya memiliki sistem informasi yang lebih baik dan tentunya dengan tools yaitu teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem kerja organisasi tersebut.

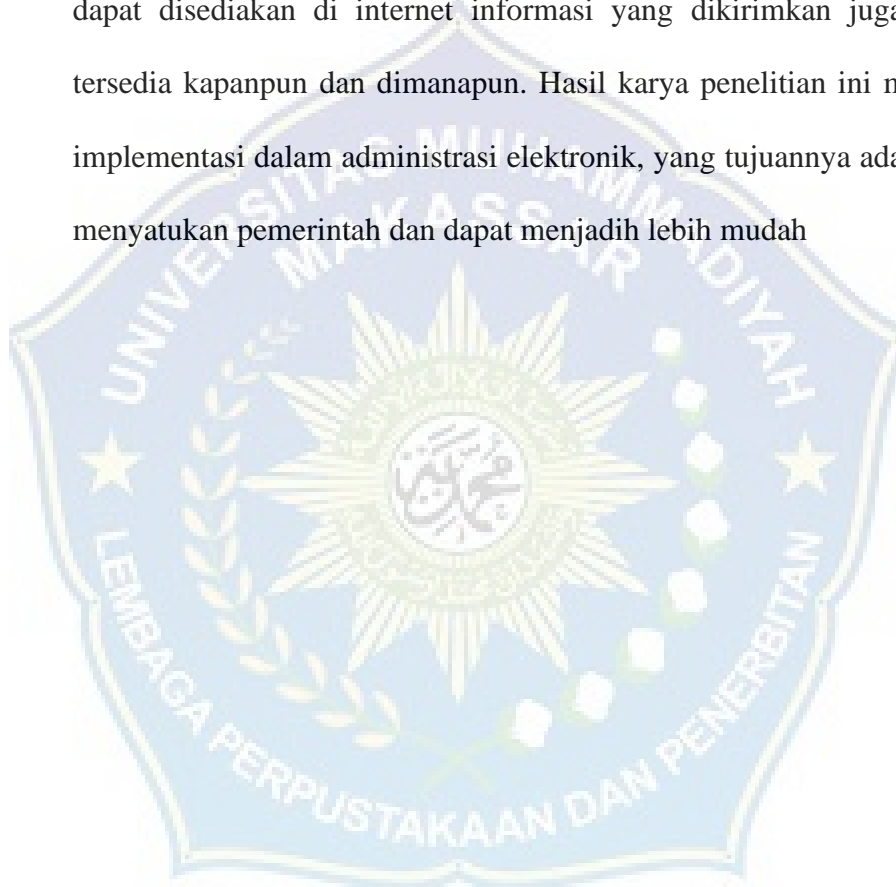
3. Kemudahan dalam mencari informasi dari pemerintah

Pemerintah daerah yang otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sedikit yang mencapai tingkat kedua (maturity), sedangkan tingkat ketiga (pemantapan) dan keempat (eksploitasi) belum tercapai. Artinya implementasi *E-Government* di Indonesia masih dalam tahap awal, sehingga banyak yang mengklaim *E-Government* kepada pihak yang berwenang sebenarnya baru pada tahap online presence. Tantangan terbesar terletak pada kapasitas dan kesiapan manajemen dan operator, bukan teknologi yang mendukung *E-Government*, dan jika tidak dibenahi, akibatnya bisa menjadi kesenjangan digital. Selain itu,

transparansi politik dan pelaksanaan otonomi daerah semakin sulit diatur dan menghalangi jalan menuju demokratisasi penuh.

4. Kecepatan penyajian informasi.

Adanya informan bahwa *E-Governance* membantu untuk mencari informasi tentang pemerintahan bahkan dari pemerintah pelayanan publik dapat disediakan di internet informasi yang dikirimkan juga berlaku, tersedia kapanpun dan dimanapun. Hasil karya penelitian ini merupakan implementasi dalam administrasi elektronik, yang tujuannya adalah untuk menyatukan pemerintah dan dapat menjadi lebih mudah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian di Dinas Kementrian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) di Kabupaten Bone.

B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni mendeskripsikan tentang Efektivitas Penerapan *E-Government* dalam Pengelolaan Informasi di Kabupaten Bone. Berhubungan dengan hal yang teliti adalah fenomena sosial, maka dibutuhkan informasi mendalam melalui pendeskripsian berdasarkan ungkapan bahasa masing-masing informan sehingga dapat diungkapkan makna sebenarnya dari informasi yang diperoleh.
2. Tipe penelitian ini deskriptif ini mencakup representasi tunggal dan jamak dari fenomena sosial tertentu . Biasanya, data dikumpulkan dari satu atau lebih sumber menggunakan metode pengamatan/pengamatan langsung atau survei. penelitian dapat bersifat kuantitatif, kualitatif dan kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Deskriptif jenis kajian dalam ilmu komunikasi sangat berguna untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia, seperti komunikasi menggunakan beberapa cara baru. Penerapan *E-Government* dalam pengelolaan Informasi di Dinas Kabupaten Bone.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini dipilih beberapa orang sebagai informan utama yang berperan penting dalam penerapan informasi berbasis *e-government* di Kabupaten Bone.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1	Geldhy Adhitara Gunawan, S.H.,M.Si	Kepala Bidang Teknologi Informatika Diskominfo Kabupaten Bone	1 Orang
2	Darmawan Ramli, S.E.,M.Si	Bidang Manggala Informatika Ahli Muda Diskominfo Kabupaten Bone	1 Orang
3	Irna Aprianti	Masyarakat	1 Orang
4	Akhmad Muflih R.	Masyarakat	1 Orang
Jumlah			4 Orang

Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah kepala Kantor, staf dan masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informasi, di Kabupaten Bone

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang valid dan relevan, maka penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni:

a. Wawancara (interview)

Teknik ini merupakan kegiatan Tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang digunakan peneliti adalah

wawancara langsung terhadap informan dan responden. Penelitian menggunakan handphone dengan aplikasi (*voice recorder*) untuk merekam hasil wawancara responden dan peneliti juga menggunakan alat tulis berupa buku dan ball point untuk menulis hal-hal penting yang disampaikan oleh responden. Responden diminta untuk memberikan informasi dalam bentuk fakta yang terjadi, opini yang disampaikan, sikap, dan lain-lain.

b. Pengamatan (observasi)

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar terjadi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bone. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal ini Efektivitas Penerapan *E-Government* dalam Pengelolaan Informasi di Kabupaten Bone.

c. Dokumentasi

Teknik merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan objek. Dalam pedoman dokumentasi peneliti menggunakan handphone dalam rangka menguatkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi peneliti. Peneliti mengambil gambar disetiap momen yang penting untuk mendukung penelitian.

E. Teknik Pengabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan data triangulasi, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam triangulasi, diantaranya yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi menggunakan sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah di peroleh melalui beberapa sumber. Data yang telah di uraikan oleh peneliti tersebut dapat di buat kesimpulan. Oleh karena itu triangulasi sumber merupakan langkah pemeriksaan kembali data-data yang ditemukan dari informan dengan cara menganalisis keaslian informasi maupun data.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan peneliti dapat dilakukan.

3. Sajian data

Sajian data merupakan sesuatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya menjadi dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dan hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Bone

Sejarah mencatat bahwa Bone dahulu merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone dalam catatan sejarah didirikan oleh Raja Bone ke-1 yaitu Manurunge ri Matajang pada tahun 1330 Masehi, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan La Tenritatta Arung Palakka pertengahan abad ke-17. Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat memberi pelajaran dan hikmah yang bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi kecenderungan yang bersifat global.

Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah kerajaan Bone pada masa lalu minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk diaktualisasikan dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan ke arah yang lebih baik. Ketiga hal yang dimaksud adalah :

Pertama, pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau

dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut “Ade Pitue”, yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasihat raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh Ade' Pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan.

Ade Pitu merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone yang bertugas mengawasi dan membantu pemerintahan kerajaan Bone yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu :

- a) Arung Ujung, bertugas Mengepalai Urusan Penerangan Kerajaan Bone
- b) Arung Pongeng, bertugas Mengepalai Urusan Kepolisian/Kejaksaan dan Pemerintahan
- c) Arung Ta, Bertugas Bertugas Mengepalai Urusan Pendidikan dan Urusan Perkara Sipil
- d) Arung Tibojong, Bertugas Mengepalai Urusan Perkara / Pengadilan Landschap/ Hadat Besar dan Mengawasi Urusan Perkara Pengadilan Distrik.
- e) Arung Tanete Riattang, Bertugas Mengepalai Memegang Kas Kerajaan, Mengatur Pajak dan Mengawasi Keuangan
- f) Arung Tanete Riawang, Bertugas Mengepalai Pekerjaan Negeri (Landschap Werken – LW) Pajak Jalan Pengawas Opzichter.

g) Arung Macege, Bertugas Mengepalai Pemerintahan Umum Dan Perekonomian.

Selain itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat mengedepankan asas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berasal dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada tahun 1507-1586 pada masa pemerintahan Raja Bone ke-7 Latenri Rawe Bongkangnge. Kajo laliddong berpesan kepada Raja bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu:

- a) Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkau'E mitai munrinna gau'e (Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan).
- b) Maduanna, Maccapi Arung Mangkau'E duppai ada' (Raja harus pintar menjawab kata-kata).
- c) Matellunna, Maccapi Arung MangkauE mpinru ada' (Raja harus pintar membuat kata-kata atau jawaban).
- d) Maeppa'na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng (Duta tidak lupa menyampaikan kata-kata yang benar).

Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan ke dalam pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa pentingnya perasaan, pikiran dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi.

Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone terletak pada pandangan yang meletakkan kerjasama dengan daerah lain, dan pendekatan diplomasi sebagai bagian penting dari usaha membangun

negeri agar menjadi lebih baik. Urgensi terhadap pandangan seperti itu tampak jelas ketika kita menelusuri puncak-puncak kejayaan Bone dimasa lalu. Dan sebagai bentuk monumental dari pandangan ini di kenal dalam sejarah akan perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng yang melahirkan *Tellumpoccoe* atau dengan sebutan lain “*Lamumpatue Ri Timurung*” yang dimaksudkan sebagai upaya mempererat tali persaudaraan ketiga kerajaan untuk memperkuat posisi kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar.

Ketiga, warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan yang mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu. Banyak hikmah yang bisa dipetik dalam menghadapi kehidupan, dalam menjawab tantangan pembangunan dan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat. Namun yang terpenting adalah bahwa semangat religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk perubahan dan dinamikanya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Bone kemudian berkembang terus dan pada akhirnya menjadi suatu daerah yang memiliki wilayah yang luas, dan dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II Bone yang merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bone memiliki potensi besar, yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi kemakmuran rakyat. Potensi itu cukup beragam seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, dan potensi lainnya.

2. Letak Geografis

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Ibukota Kabupaten Bone adalah Watampone.

Secara geografis Kabupaten Bone berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- Utara : Kabupaten Wajo dan Soppeng
- Timur : Teluk Bone
- Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa
- Barat : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru.

Secara astronomis Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13' – 5°6' Lintang Selatan dan antara 119°42'-120°30' Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone beriklim tropis. Sepanjang tahun 2020, kelembaban udara berkisar antara 77–86 persen dengan suhu udara 24,4°C-27,6°C.

3. Visi misi Pemerintahan Kabupaten Bone

o Visi

Visi Pemerintahan Kabupaten Bone adalah “Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, Dan Sejahterah”, Adapun penjelasan visi tersebut, yaitu:

- a) **Mandiri:** kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- b) **Berdaya Saing:** mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.
- c) **Sejahtera:** mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

o Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

- 2) Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 3) Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
- 4) Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- 5) Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
- 6) Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

B. Gambaran Khusus Objek Penelitian

1. Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo Kabupaten Bone
 - a. Kepala Dinas
 - 1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

- b) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d) pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Dinas

- 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- 2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyusunan program dan anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - b) pelaksanaan program dan anggaran;
 - c) pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - d) penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;

- e) penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g) penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h) pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- 2) menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- 3) menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- 4) membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- 5) melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;

- 6) melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- 7) menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perengkapan/aset;
- 8) melaksanakan pembinaan staf; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

d. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan yang mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
- 2) melaksanakan fasilitasi dan penyesuaian program dan penganggaran di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- 3) melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pendidikan;
- 4) melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- 5) melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- 6) melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 7) menyiapkan rencana umum pengadaan;

- 8) membuat rencana kerja tahunan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

e. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

- 1) menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- 3) mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- 4) mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- 5) membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- 7) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan

- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

f. Bidang Komunikasi

- 1) Bidang Komunikasi mempunyai tugas,penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
- 2) Bidang Komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan strategi perencanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - b) perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - c) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - d) pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - e) pelaksanaan penertiban dokumen pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - f) pendokumentasian hasil pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;

- g) pengendalian dan gevaluasi pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

C. Hasil Penelitian

1. Mengetahui kegunaan *E-Government* bagi masyarakat.

Manfaat *e-government* bagi masyarakat sangat banyak. Agar pemerintah berfungsi secara efisien, ia harus menjaga kesejahteraan publik dan menyediakan layanan publik yang berkualitas. Agar hal ini terjadi, perlu memastikan bahwa warga memiliki akses yang tepat terhadap informasi. Mereka perlu menyadari hak-hak mereka dan ini paling baik dilakukan oleh pemerintah yang terinformasi. Internet adalah salah satu cara terbaik untuk menyebarkan informasi ini dan memastikan bahwa setiap orang mengetahui manfaat dari *e-government*. Selain itu, teknologi Internet telah memungkinkan orang-orang dari berbagai negara untuk berbagi dan berkomunikasi tentang kebijakan dan masalah publik.

Oleh karena itu, diperlukan juga pekerjaan Administrasi dalam manajemen elektronik, dukungan personel dan infrastruktur yang baik serta strategi pemasaran. Strategi pemasaran *e-government* tidak hanya didasarkan pada tampilan online yang menarik, tetapi juga membutuhkan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat pedesaan yang belum terlalu paham tentang internet dan *e-government* terkhusus di Kabupaten Bone. Dengan cara ini, orang terbiasa menggunakan teknologi informasi yang biasa.

Untuk dapat mengetahui manfaat penerapan *e-government* yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone. Maka penulis melakukan wawancara kepada Geldy Adhtra Gunawan sebagai Kepala Bidang Teknologi Informatika yang mengatakan:

“Berbicara tentang *e-government* istilahnya ialah sistem pelayanan pemerintah, Sudah beberapa hal yang kami lakukan walaupun belum secara merata sebagai contoh penyediaan website yang dapat di akses masyarakat, penyediaan jaringan hospot di lokasi-lokasi tertentu sebagaimana di era sekarang menuntut masyarakat untuk dapat memanfaatkan teknologi” (Hasil wawancara kepada informan GA, 18 Mei 2023).

Hal berkaitan juga di sampaikan oleh kepala bidang aplikasi dan *e-government* Diskominfo Kabupaten Bone yang mengatakan:

“Dalam mengetahui pelayanan berbasis digital di Kabupaten Bone, yaitu masyarakat dapat mengakses informasi layanan dan inovasi aplikasi layanan pemerintah melalui website resmi yang telah di sediakan”(Hasil wawancara kepada informan EP, 18 Mei 2023).

Pelayanan Informasi serta literatur digital bagi masyarakat (*Website*), Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone memberikan akses serta mendukung pelayanan informasi secara online, serta implementasi dari pihak Diskominfo Kabupaten Bone keterbukaan serta pelayanan informasi bagi masyarakat dengan melakukan pelayanan informasi melalui *website* yang dapat diakses melalui platform internet dengan mengetik alamat platform (<https://bone.co.id>). Penggunaan *website* juga digunakan sebagai penyedia kabar resmi.

Terdapat pada halaman website sudah banyak memfasilitasi fitur layanan informasi yang beragam mulai dari beranda profil, pemerintahan

sampai dengan jenis aplikasi *e-government* untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi layanan pemerintah bagi masyarakat di Kabupaten Bone. Sejalan dengan untuk mengetahui efektifitas penerapan *e-government* yang di lakukan Diskominfo Kabupaten Bone, penulis juga melakukan Wawancara terhadap masyarakat yang ikut merasakan penerapan *e-government* di Kabupaten Bone menjelaskan sebagai berikut:

“Sangat cocok karena era modern saat ini nilai mampu menjalankan sistem pemerintahan menurut efisien efektif cepat akurat dan transparan serta dapat meningkatkan untuk pelayanan dengan sasaran dan dalam menentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau, Selain itu membutuhkan hubungan interaktif dengan dunia usaha guna meningkatkan perekonomian serta pembentukan mekanisme komunikasi sistem manajemen yang lebih baik pemerintah contoh peningkatan hubungan antar pemerintah dalam bisnis dan masyarakat umum harus koneksi tentunya dengan adanya keterbukaan atau transparansi yang diharapkan hubungan antara antara berbagai pihak menjadi lebih baik”(Hasil wawancara kepada informan IA, 19 Mei 2023).

Selanjutnya dalam mendukung hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan maka dilakukan pula wawancara kepada masyarakat yang bernama Akhmad Muflih R. yang memberikan keterangannya bahwa

“.. dengan adanya egov yang diterapkan oleh pemerintah al ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekalipun memiliki sisi kelemahan. Namun dengan adanya penerapan ini dapat mempermudah masyarakat menagkses berita yang ada dikabupaten Bone itu sendiri” (Hasil wawancara kepada informan AM, 07 Juli 2023)

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis terkait dengan indikator mengetahui manfaat *e-government* dalam efektivitas penerapan *e-government* pengelolaan informasi di Kabupaten Bone dapat di simpulkan bahwa Diskominfo Kabupaten Boneh telah penyedian website yang dapat di akses masyarakat, penyediaan jaringan hospot di lokasi-lokasi

tertentu, website tersebut sudah banyak memfasilitasi fitur layanan informasi yang beragam mulai dari beranda profil, pemerintahan sampai dengan jenis aplikasi *e-government* untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi layanan pemerintah bagi masyarakat di Kabupaten Bone.

2. Menguntungkan manfaat *E-Government* bagi masyarakat

Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari organisasi, baik organisasi komersial (profit) maupun sosial (nirlaba), tanpa memikirkan berapa nilai investasi yang harus ditanamkan. Investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi merupakan masalah yang kompleks bagi para pemimpin organisasi. disisi lain, mereka mengetahui dan berpikir bahwa sudah saatnya organisasinya memiliki sistem informasi yang lebih baik dan tentunya dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem kerja organisasi tersebut. Untuk dapat mengetahui keuntungan penerapan *e-government* yang di lakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone. Maka dari itu penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika yang mengatakan:

“Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat terkait dengan adanya penerapan *e-government* bisa lebih terurai dengan cepat mungkin ya yang pertama masyarakat tidak butuh lagi harus jauh-jauh menerima layanan, misalkan di Kabupaten Bone ini kan terdiri dari 27 Kecamatan memiliki wilayah yang sangat luas jadi misalkan saya kasih contoh di catatan sipil masyarakat yang ingin melakukan layanan dan sejenisnya, sebelum mereka datang ke kantor terkait hanya bisa membuka dulu informasi-informasi yang sudah kita berikan melalui website dan aplikasi lainnya, jadi tidak perlu lagi di masyarakat istilahnya bolak-balik yang membutuhkan biaya yang mungkin jadi kendala istilahnya lebih bisa memangkas apa biaya-biaya berjalan”(Hasil wawancara kepada informan GA, 18 Mei 2023).

Kemajuan dalam penerapan dari teknologi informasi dan komputer diharapkan mampu menghasilkan keunggulan strategis bagi orang-orang yang melaksanakan kegiatan di dalamnya. Wawancara di atas dapat di dukung dengan pernyataan dari manggala informatika ahli muda Diskominfo Kabupaten Bone yang mengatakan:

“Kegunaan manfaat e-gov bagi pemerintah dan masyarakat yaitu membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya melalui *e-government* pemerintah dapat menyimpan dan mendistribusikan data mengenai kegiatan yang di lakukan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kegiatan pemerintah” (Hasil wawancara kepada informan EP, 18 Mei 2023)

Selain itu pendapat lain juga di ungkapakan dari pihak masyarakat berkaiatan dengan Pejabat Pengelola *e-government* di Kabupaten Bone Mengatakan:

“Selama ini sudah merasa sangat puas penggunaan jaringan ini mungkin bisa dibatasi bagian anak-anak yang di bawah 18 tahun namun di sisi lain ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan internet ini dengan tidak sehat sehingga memberikan dampak yang tidak bermanfaat bagi masyarakat seperti gosip arti sosial hingga menyebabkan konten-konten dewasa atau konten merugikan banyak orang sehingga bisa merusak banyak kalangan muda yang akan susah menjadi pengurus bangsa kita ini dan isu negatif lainnya” (Hasil wawancara kepada informan IA, 19 Mei 2023).

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis terkait dengan indikator menguntungkan manfaat *e-government* dari efektivitas penerapan *e-government* pengelolaan informasi di Kabupaten Bone dapat di simpulkan bahwa Kegunaan manfaat *e-government* bagi pemerintah dan masyarakat yaitu membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya melalui *e-government* pemerintah dapat menyimpan dan mendistribusikan data mengenai kegiatan yang di lakukan.

3. Kemudahan dalam mencari informasi dari pemerintah

Pemerintah daerah yang otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sedikit yang mencapai tingkat kedua (*maturity*), sedangkan tingkat ketiga (pemantapan) dan keempat (eksploitasi) belum tercapai. Artinya implementasi *e-government* di Indonesia masih dalam tahap awal, sehingga banyak yang mengklaim *e-government* kepada pihak yang berwenang sebenarnya baru pada tahap *online presence*. Tantangan terbesar terletak pada kapasitas dan kesiapan manajemen dan operator, bukan teknologi yang mendukung *e-government*, dan jika tidak dibenahi, akibatnya bisa menjadi kesenjangan digital. Selain itu, transparansi politik dan pelaksanaan otonomi daerah semakin sulit diatur dan menghalangi jalan menuju demokratisasi penuh.

Untuk dapat mengetahui kemudahan penerapan *e-government* yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone. Maka dari itu penulis melakukan wawancara kepada Bidang Teknologi Informatika Diskominfo Kabupaten Bone yang mengatakan:

“Pengaplikasian *e-government* di Kabupaten Bone tentunya memberikan kemudahan bagi pemerintah dan masyarakat, saat ini layanan inovasi pemerintah Kabupaten Bone sudah ada 33 inovasi layanan yang dioperasikan masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Bone yang dapat diakses langsung masyarakat” (Hasil wawancara kepada informan GA, 18 Mei 2023)

Hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa telah mengoperasikan 33 inovasi pelayanan memudahkan instansi pemerintah daerah Kabupaten Bone. Inovasi pelayanan *e-government* tersebut yaitu: Lhkpn, Sipp Bone, Oss, Saoraja, E-lontara, Siola, Mcp-kpk, Siharka, Sakip, Sirup, Monev/Anggaran,

Sippd, Absensi, Kinerja, Perizinan, Doa Pegawai, Lpse, Laport, Siakuda, Pengadaan, Belanja, Lkkp, Email, Simpeg, Simaya, Ppid, Kotak Saran, Sipd Kemendagri, dan sistem informasi tempat wisata Kab. Bone. Selain itu pendapat lain juga di ungkapkan dari pihak masyarakat berkaitan dengan Pejabat Pengelola *E-Government* di Bone yang menerangkan:

“Perkebangan teknologi saat ini sangat pesat, pemberian layanan informasi pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan berbasis elektronik harus sampai ke pelosok Kecamatan, dan tentunya perlu adanya sosialisasi pendidikan penggunaan website dan jaringan internet di tengah-tengah masyarakat”(Hasil wawancara kepada informan IA, 19 Mei 2023).

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis terkait dengan indikator kemudahan mencari informasi dari efektivitas penerapan *e-government* pengelolaan informasi di Kabupaten Bone dapat di simpulkan bahwa kemudahan masyarakat dapat di nikmati degan Diskominfo menyediakan website, jaringan internet dan hospot serta 33 inovasi layanan yang di oprasikan masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Bone yang dapat di akses langsung masyarakat.

4. Kecepatan penyajian informasi.

Karna dengan informan bahwa *e-government* membantu untuk mencari informasi tentang pemerintahan bahkan dari pemerintah pelayanan publik dapat disediakan di internet informasi yang dikirimkan juga berlaku, tersedia kapanpun dan dimanapun. Hasil karya penelitian ini merupakan implementasi dalam administrasi elektronik, yang tujuannya adalah untuk menyatukan pemerintah dan dapat menjadiah lebih mudah.

Untuk dapat mengetahui kecepatan penyajian informasi *e-government* yang di lakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone. Maka dari itu penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika Diskominfo Kabupaten Bone yang mengatakan:

“Kami tidak tahu apakah semua masyarakat bisa terima atau tidak tapi yang jelas kita sudah berusaha maksimal. Mungkin tergantung dari masyarakat yang menerima atau tidak. Tapi kalau menurut saya, yang selama ini saya lihat, kendala kendala yang kami hadapi terdapat pada fasilitas sumber daya anggaran yang masih perlu di tingkatkan, jika hal tersebut teratasi pasti semuanya terlayani dengan jaringan internet. Supaya bisa menjangkau mungkin tidak ketinggalan terkait dengan berita informasi dan sebagainya. Cuma untuk sampai sekarang kami dari Kominfo itu baru sekitar kurang lebih 15 kalau bukan 16 kecamatan yang bisa kita layani jaringan internet. Yang harusnya kan 27 kecamatan, otomatis masih ada sekitar kurang lebih 11 kecamatan yang belum kami jangkau. Tapi itu yang menjadi catatan buat kami dan ke depan tetap akan kami prioritaskan yang jadi kendala memang terkait dengan anggaran. Kami juga tidak bisa, kalau kita sih ditanya mau berbuat, semua terlayani” (Hasil wawancara kepada informan GA, 18 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, salah satu kendala pemerintah menyediakan informasi layanan di sebabkan sumber daya, anggaran yang perlu di tingkatkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi layanan dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bone dapat di fasilitasi dengan baik. Dari wawancara di atas dapat di dukung dengan pernyataan dari manggala informatika ahli muda Diskominfo Kabupaten Bone yang mengatakan:

“Sala satu kegunaan dari penerapan sistem pemerintahan elektronik yaitu pelayanan cepat dari pemerintah ke masyarakat, jadi berbicara tentang kecepatan penyediaan informasi dapat cepat di publikasikan di *website* resmi dan juga berlaku 24 jam walaupun kantor pemerintah telah tutup” (Hasil wawancara kepada informan GA, 18 Mei 2023)

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 5 menyebutkan a.

menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik dan e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan.

Hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis terkait dengan indikator kecepatan penyajian informasi *e-government* dari efektivitas penerapan *e-government* pengelolaan informasi di Kabupaten Bone dapat disimpulkan bahwa efektifitas kecepatan penyediaan informasi di Kabupaten bone dapat cepat di publikasikan dengan update *website* resmi sehingga informasi layanan dapat diakses 24 jam walaupun kantor pemerintah telah tutup dan sosialisasi spot *free wifi* yang telah dilaksanakan.

D. Pembahasan Penelitian

Sistem Informasi adalah suatu sistem yang terdiri atas berbagai jenis komponen-komponen yang tersusun dalam suatu organisasi demi mewujudkan tercapainya tujuan yaitu mendapatkan sebuah informasi. Sistem informasi sangatlah memiliki banyak manfaat mulai dari menginput data, menangkap data memanipulasi data input, memanipulasi data tersimpan, sebagai blok keluaran informasi, sebagai dokumentasi manajemen, menjalankan model, penyimpanan dan mengakses data.

Komponen-komponen yang sangat berguna oleh sistem informasi menjadikan sistem informasi sangat dibutuhkan kalangan. Organisasi apalagi dalam suatu perusahaan, baik itu kalangan swasta maupun negeri (Fachrial et al., n.d.). Keunggulan dari sistem informasi ini adalah kecepatan dan ketepatan pengolahan data dengan kapasitas yang cukup besar, serta kemudahan dan kecepatan dalam mengambil informasi dari data base yang cukup besar. Karena kelebihan, kenyamanan dan kecepatan proses informasi, sistem informasi ini sangat berguna bagi semua otoritas, baik swasta maupun lembaga negara (Dwijosusilo & Sarni, 2018)

E-Government merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pengolahan data yang cepat dan informasi yang akurat. *e-government* diperlukan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan Pemerintah khususnya birokrasi.

Dalam pembahasan ini akan membahas dari hasil penelitian tentang efektifitas penerapan *e-government* di diskominfo Kabupaten Bone di mana peneliti menggunakan 4 Variabel dalam penelitian ini yaitu mengetahui *e-government*, manfaat *e-govement*, kegunaan bagi masyarakat, kemudahan mencari informasi, dan kecepatan penyajian informasi. Adapun pembahasan dari hasil penelitian sebagai berikut

1. Mengetahui kegunaan *E-Government* bagi masyarakat.

Kabupaten Bone merupakan daerah yang telah melakukan penerapan kebijakan instruksi Presiden dengan hadirnya website di [Kominfo. oke.go.id](http://Kominfo.oke.go.id). Website tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi tentang Kabupaten Bone. Sewa Peraturan Pemerintah Negara Nomor 383 Tahun 2021. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Edisi 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038). Pemanfaatan website di Pemerintah Kabupaten Bone adalah untuk menciptakan pengelola website yang mampu menyediakan dan menyampaikan informasi untuk kepentingan Pemerintah daerah serta meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui internet. Website Pemerintah Kabupaten Bone adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten Bone di Internet untuk memberikan informasi tentang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.

Sebagaimana telah di sebutkan oleh penulis sebelumnya, Internet adalah salah satu cara terbaik untuk menyebarkan informasi ini dan memastikan bahwa setiap orang mengetahui manfaat dari *e-government*. Selain itu, teknologi Internet telah memungkinkan orang-orang dari berbagai negara untuk berbagi dan berkomunikasi tentang kebijakan dan masalah publik. Hasil temuan menulis dapat kita lihat bahwa Pelayanan Informasi serta literatur digital bagi masyarakat (*Website*), Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone dengan memberikan akses serta mendukung pelayanan informasi secara online, serta implementasi dari pihak Diskominfo Kabupaten Bone keterbukaan serta pelayanan informasi bagi masyarakat dengan

melakukan pelayanan informasi melalui *website* yang dapat diakses melalui platform internet dengan mengetik alamat platform (<https://bone.co.id>).

2. Menguntungkan manfaat *E-Government* bagi masyarakat

Untuk mengetahui keuntungan manfaat juga menjadi faktor penting untuk efektifitas penerapan informasi layanan berbasis *e-government* yang berhubungan dengan pelaksana dan masyarakat. Hasil penelitian yang di temukan penulis kemudahan informasi berbasis *e-government* untuk masyarakat dapat di nikmati degan Diskominfo menyediakan *website*, jaringan internet dan hospot serta 33 inovasi layanan yang di oprasikan masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Bone yang dapat di akses langsung masyarakat.

Hasil penelitian penulis, dari 2 indikator di atas dapat juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Muhibbudin, 2022) melihat pelaksanaan kemanfaatan dari efektifitas penerapan *e-government* dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan tergolong baik dalam partisipasi masyarakat dalam tahap penyediaan sistem informasi berbasis elektronik. Efektivitas kerja bermanfaat dalam memberikan pelayanan kepada orang lain atau kepada organisasi yang menggunakan produknya, seperti halnya dengan organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun program organisasi yang bersangkutan. Tentunya melalui efektifitas memberikan banyak hal yang dapat menunjang akreditasi serta *value* dari sebuah organisasi, dan akan menambah peluang kerjasama serta relasi yang akan membangun serta memajukan organisasi tersebut.

Pengembangan *E-Government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan yaitu diantaranya :

- 1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Pembentukan ini meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan Internasional.
- 3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- 4) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga Pemerintah dan Pemerintah daerah otonom.

3. Kemudahan dalam mencari informasi dari pemerintah

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa informan terdapat hubungan kegunaan dan tujuan dari hasil penelitian penulis di indikator Ke 3 yaitu kemudahan mencari informasi, merupakan tantangan terbesar terletak pada kapasitas dan kesiapan manajemen dan operator, bukan teknologi yang mendukung *e-government*, dan jika tidak dibenahi, akibatnya bisa menjadi kesenjangan digital. Selain itu, transparansi politik dan pelaksanaan otonomi daerah semakin sulit diatur dan menghalangi jalan menuju demokratisasi penuh.

Salah satu kendala pemerintah menyediakan informasi layanan di sebabkan sumber daya, anggaran yang perlu di tingkatkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi layanan dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bone dapat di fasilitasi dengan baik.

Hasil temuan kemudahan mencari informasi dari efektivitas penerapan *e-government* pengelolaan informasi di Kabupaten Bone dapat di simpulkan bahwa kemudahan masyarakat dapat di nikmati degan Diskominfo menyediakan *website*, jaringan internet dan hospot serta 33 inovasi layanan yang di oprasikan masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Bone yang dapat di akses langsung masyarakat. Hal ini sejalan dengan di sampaikan oleh Mustopadijaya (2003) dalam (Habibullah, 2010) mengusulkan bahwa *e-government* yang diberikan kepada Pemerintah dapat menerapkan teknologi internet, intranet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program-program dan jasa.

4. Kecepatan penyajian informasi.

Pada indikator Ke 4 yaitu kecepatan penyajian informasi dengan hasil penelitian penyajian informasi *e-government* dari efektivitas penerapan *e-government* pengelolaan informasi di Kabupaten Bone bahwa efektifitas kecepatan penyediaan informasi di Kabupaten Bone dapat cepat di publikasikan dengan update *website* resmi sehingga informasi layanan dapat di akses 24 jam walaupun kontor pemerintah telah tutup dan sosialisasi spot *free wifi* yang telah di laksanakan. Indrajit (2002) dalam (Aprianty, 2016) menjelaskan adanya kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi). Dapat berefek kepada cepatnya informasi, informasi dan informasi dapat dibuat dengan sangat-

sangat cepat dan dapat langsung digunakan dalam hitungan detik di semua lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia.

Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 5 menyebutkan a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik dan e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan. Hasil penelitian penulis, dari 2 indikator di atas dapat sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Muhibbudin, 2022) melihat kemudahan dan cepatnya akses untuk masyarakat memiliki respon positif dalam aspek sistem informasi pelayanan berbasis elektronik (*e-government*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bab sebelumnya maka penelitian dapat membuat sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Diskominfo Kabupaten Bone telah menyediakan website yang dapat di akses masyarakat, penyediaan jaringan hospot di lokasi-lokasi tertentu, website tersebut mempunyai fitur layanan informasi yang beragam mulai dari beranda profil, pemerintahan sampai dengan jenis aplikasi *e-government* untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi layanan pemerintah bagi masyarakat di Kabupaten Bone.
2. Kegunaan manfaat *e-government* bagi pemerintah dan masyarakat yaitu membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya melalui *e-government* pemerintah dapat menyimpan dan mendistribusikan data mengenai kegiatan yang di lakukan.
3. Kemudahan masyarakat dapat di nikmati degan Diskominfo menyediakan website, jaringan internet dan hospot serta 33 inovasi layanan yang di oprasikan masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Bone yang dapat di akses langsung masyarakat.
4. Efektifitas kecepatan penyediaan informasi di Kabupaten Bone dapat cepat di publikasikan dengan update *website* resmi sehingga informasi layanan dapat di akses 24 jam walaupun kantor pemerintah telah tutup dan sosialisasi spot *free wifi* yang telah di laksanakan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis ada berapa hal yang penulis sarankan semoga kiranya dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua tanda terkecuali.

1. Diperlukan penguatan dari sisi kebijakan agar semua kebijakan yang telah ada dilakukan evaluasi yang terdokumentasi, serta adanya tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut berupa peraturan yang baru,
2. Perlu ditingkatkan pemahaman tentang penggunaan aplikasi berbasis *e-government* di pelosok kecamatan, desa yang minim pengetahuan tentang *e-government* di Kabupaten Bone
3. Perlunya perhatian pemerintah dalam mengelolah sumber daya manusia (SDM) pelaksana kebijakan, Sumber dana yang di perlukan, dan pelayanan yang memauskan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., & Rofiah, S. (2022). Dakwah Modern Pada Era Konvergensi Media: Studi Kasus Youtube Pondok Pesantren Nurul Jadid Modern Da'wah in the Era of Media Convergence: Case Study Youtube of the Nurul Jadid Islamic Boarding School. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 8(2).
- Allena, J. M., Howellsa, K., & Radford, R. Abdurahmat, 2003. Pengertian Efektivitas. Jakarta: PT. Rineka Cipta. *Training and Development*, 40(2), 90-110.
- Alfrait, A., Roosinda, F. W., & Permatasari, D. B. A. (2021). Kemarahan Joko Widodo Dalam Pembungkahan Media Daring Joko Widodo's Anger In Framing Online Media. *Spektrum Komunikasi*, 9(1), 90-104.
- Anwar, M. (2020). Manajemen Strategik Daya Saing dan Globalisasi. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 1–105.
- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, volume 4(4), hlm. 1593.
- Barker, W. C., Johnson, G. C., Hunt, L. T., George, D. G., & Tsugita, A. (1986). Similar domains in different proteins: detection and significance. *Tanpakushitsu Kakusan Koso. Protein, Nucleic Acid, Enzyme*, 29 Suppl, 54–68.
- Cyndika, S. A. (2018). *Implementasi kebijakan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.* 1–153.
- Djunaedi, A. (2002, October). Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia. In *Seminar Nasional E-Government & Workshop Linux. Fakultas MIPA UGM. Yogyakarta* (Vol. 30).
- Dwijosusilo, D. K., & Sarni. (2018). Peranan Rekam Medis Elektronik Terhadap Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. *Jurnal Administrasi*, 1–120. http://repository.unitomo.ac.id/1713/1/Penelitian_Genap_2018-2019_Kristyan.pdf
- Fachrial, E., Si, S., & Si, M. (n.d.). *BERBASIS PEMBELAJARAN ONLINE (DARING)*.
- Fahreza, Arifin, J., & Suryani, L. (2019). Effectiveness of Prosperous Rice Program (Rastra) in Binangon Village , Muara Komam District Paser Regency. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 2(2), 566–584.
- Habibullah, A. (2010). *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government.* 23(c), 187–195.

- Handayani, S. (2020). *Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Melalui Penerapan E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone*. July, 1–23.
- Hasibuan, A., & Sulaiman, oris kianto. (2019). Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 127–135. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097>
- Iqbal, M., Fahmi, D., Nasution, D. R., & Dalimunthe, N. H. (2023). *Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Membangun Karakter di MAN 1 Deli Serdang*. 05(02), 3431–3436.
- Ishaq, I. A. (2022). *Penerapan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Sebagai Layanan Pengaduan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Khariroh, U. (2021). Tibanndaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 211–212. file:///E:/Contoh Artikel/Artikel Jurnal/68 - 82 + Cover Depan.pdf
- Mahsun, M., & Koiriyah, M. (2017). *Metode Penelitian Bahasa. Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Rajawali Press.
- Muhibbudin, A. W. U. A. D. (2022). *Efektivitas Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Melalui Sappa Bone Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Matsumoro, S. H. I. N. I. C. I., Qualley, S., Goel, S. H. I. L. A., Hacman, D. K., Swee, I. A. N. R., Poot, V. I. N. C. E. N. T., ... & Rees, J. A. (2002). Pancreas Preservation On Human Islet Isolation, As Assessed By The Edmonton Isolation Protocol.
- Mubarak, M. (2017). *Aplikasi Pelaporan Pelayanan Publik Berbasis Android (Studi Kasus: Ombudsman Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Patarai, M. I. (2020). *Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Patarai, M. I. (2020). Kebijakan publik daerah: Posisi dan dimensinya dalam perspektif desentralisasi kebijakan (Vol. 1). De La Macca.
- Putri, U. H. (2019). *Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan*. Universitas Negeri Pidan.
- Sugirna. (2022). *Sugirna, S. (2022). Efektivitas Penerapan Absensi Fingerprint Terhadap Disiplin Kehadiran Pegawai di Kantor Kecamatan Ponre Kabupaten Bone= The effectiveness of the application of fingerprint attendance on the discipline of employee attendance at the Ponr*. Universitas Hasanuddin.

- Satriya, E. (2006). Pentingnya Revitalisasi e-government di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia*, 3-4.
- Sendekie Belay, B. (2021). *Preparatory School Students Learning Styles And Strategies In Learning Mathematics In Estie Woreda, South Gondar Zone, Amhara Regional State, Ethiopia* (Doctoral Dissertation, Haramaya University).
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed.)). Pt Bumi Aksara.
- Wiralestari, & Fredy O. (2018). Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Proses Pelayanan Publik Terhadap Pemanfaatan E-Government. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1-8.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>
- Satriya, E. (2006). Pentingnya Revitalisasi e-government di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia*, 3-4.
- Sendekie Belay, B. (2022). *Preparatory School Students Learning Styles And Strategies In Learning Mathematics In Estie Woreda, South Gondar Zone, Amhara Regional State, Ethiopia* (Doctoral Dissertation, Haramaya University).
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed.)). Pt Bumi Aksara.
- Wiralestari, & Fredy O. (2018). Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Proses Pelayanan Publik Terhadap Pemanfaatan E-Government. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1-8.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>

LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Wawancara Informan





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Rahmat Hidayat Lahir Di Bennae, 02 Januari 2001

Alamat Desa Cege Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

Penulis Menempuh Pendidikan Di Sekolah 235 Cege Dan

Selesai Pada Tahun 2013, Kemudian Penulis Melanjutkan

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMP 1 MARE , Dan Selesai Pada

Tahun 2016 Dan Kembali Melanjutkan Pendidikan Nya Di Sekolah Menengah

Atas SMA 2 BONE Dan Selesai Pada Tahun 2019, Kemudian Melanjut Kan

Pendidikan Di Perguruan Tinggi Di Universitas Muahmmadiyah Makassar Pada

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Dan

Mendapat Gelar S.AP Pada Tahun 2023. Penulis Sangat Bersyukur Karena Telah

Di Berikan Kesempatan Untuk Menimbah Pengetahuan Yang Nantinya Dapat

Diamalkan Dan Bermanfat